

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Berau merupakan salah satu daerah Pintu Gerbang Pembangunan di wilayah Propinsi Kalimantan Timur Bagian Utara, yang terletak di sebelah utara dari Ibu Kota Propinsi Kalimantan Timur dan sekaligus merupakan Wilayah Daratan dan Pesisir Pantai yang memiliki Sumber Daya Alam yang sangat menarik, dimana wilayah daratan terdiri dari gugusan bukit yang terdapat hampir disemua kecamatan terutama Kecamatan Kelay yang mempunyai perbukitan Batu Kapur yang luasnya hampir 100 Km² Sementara di daerah Kecamatan Tubaan terdapat perbukitan yang dikenal dengan Bukit Padai.

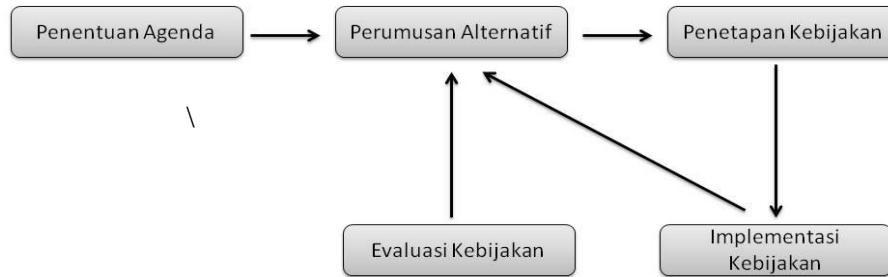
Daerah pesisir Kabupaten Berau terletak di Kecamatan Biduk-Biduk, Talisayan, Pulau Derawan dan Maratua yang secara geografis berbatasan langsung dengan lautan. Kecamatan Pulau Derawan terkenal sebagai daerah tujuan wisata yang memiliki pantai dan panorama yang sangat indah serta mempunyai beberapa gugusan pulau seperti Pulau Sangalaki, dengan batas wilayah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Kutai Kertanegara. Karena posisinya tersebut, kota yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur ini dikenal sebagai "Bumi Khatulistiwa".

Banyak sekali hal menarik dari provinsi Kalimantan Timur khususnya Kabupaten Berau, sebagai salah satu Kabupaten yang daerahnya merupakan kawasan pesisir sehingga banyak sekali wisatawan yang mengunjungi daerah tersebut, karena tertarik, dan Kabupaten Berau juga sebagai tempat wisata yang kerap didatangi oleh wisatawan baik lokal maupun manca Negara.

Dewasa ini persoalan mengenai capaian pembangunan telah menjadi perhatian para penyelenggara pemerintahan, tidak terkecuali pemerintah kota Berau. Dalam hal ini pemerintah daerah khususnya pemerintah terkait yang berada di Kabupaten Berau, harus menyusun perencanaan pembangunan yang berorientasi pada hasil dan berwawasan kedepan. Menindak lanjuti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Bab VII Pasal 150 yang menyatakan bahwa daerah wajib memiliki dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) (Nurcholis Hanif, 2009:7).

Dengan adanya perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun kedepan ini, diharapkan efisiensi dan efektivitas administrasi pemerintah dan pembangunan dapat ditingkatkan, terciptanya hubungan yang harmonis dan saling memerlukan antara pemerintah dan masyarakat serta mempertinggi daya serap aspirasi masyarakat dalam program-program pemerintah untuk membangun daerah. Para pemangku kebijakan tentu telah membuat arah kebijakan pembangunan melalui proses yang tidak mudah. Menurut Hamdi Muchlis (2014: 79) proses pembuatan kebijakan publik dibedakan kedalam 5 tahap yaitu penentuan agenda,

perumusan alternatif kebijakan, penetapan kebijakan, pelaksanaan atau implementasi kebijakan, dan penilaian atau evaluasi kebijakan.



Gambar 1.1 Proses pembuatan kebijakan publik (Hamdi Muchlis, 2014: 79)

Dari gambar diatas bisa kita memaknai bahwa tercapainya suatu tujuan pembangunan di Kabupaten Beru apabila kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah kota Berau benar-benar dilaksanakan sesuai dengan alur kebijakannya. Beberapa tahun belakangan ini jika dilihat pemerintah kota Berau baik Dispora dan KONI Berau menemui banyak permasalahan keolahragaan, yang bahkan sampai saat ini masih belum terselesaikan . Sampai saat ini Pembangunan olahraga masih diukur dari raihan medali, atau perestasi dalam cabang olahraganya saja, akan tetapi seharusnya kemajuan pembangunan olahraga diukur dari pencapaian yang mencakup 4 aspek yaitu ketersediaan ruang terbuka publik bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga, tingkat antusiasme masyarakat sehingga mau berpartisipasi dalam kegiatan olahraga,

jumlah sumber daya manusia keolahragaan yang memadai, dan tingkat kebugaran jasmani.

Pemerintah kota Berau belum menyadari adanya paradigma baru dalam mengukur kemajuan pembangunan olahraga, hal ini juga dibuktikan dengan belum adanya penelitian-penelitian yang mengkaji sudah sejauh mana upaya pemerintah dalam memajukan pembangunan olahraga di kota Berau khususnya dan di Kalimantan Timur pada umumnya. Mutohir dan Maksum (2007: 144) menyatakan dalam bukunya yaitu timbulnya kesenjangan antara kebijakan dan implementasi disebabkan oleh beberapa faktor termasuk keterbatasan daya dukung, upaya yang dilakukan masih belum maksimal dan masih bersifat parsial dan kurang komprehensif sehingga proses pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional termasuk prestasi belum dapat dilaksanakan secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan sejak usia dini dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi. Artinya bahwa perlu adanya suatu evaluasi atau penilaian kebijakan menyangkut pembahasan kembali terhadap implementasi atau pelaksanaan kebijakan pembangunan olahraga di Kota Berau.

Kebijakan pengembangan keolahragaan yang bersifat sentralistik di masa lalu, diharapkan akan lebih berkembang pesat setelah tiap-tiap daerah diberi kewenangan yang lebih leluasa untuk mengembangkan potensi keolahragaan masing-masing. Sedangkan evaluasi kebijakan sumatif adalah evaluasi yang dilakukan pada saat implementasi sudah selesai dilakukan, dan berfokus pada penilaian tentang sejauh mana hasil dan dampak pelaksanaan kebijakan memberikan kontribusi dengan medali sebagai tolak ukur pembangunan olahraga

yang digunakan oleh para pengambil kebijakan, pada masa lalu selalu mengacu pada prestasi cabang olahraga tertentu, prestasi tersebut kemudian diperkuat dengan perolehan simbol-simbol kemenangan dalam bentuk medali kemenangan.

Dengan demikian kerangka pemikiran yang digunakan selalu berujung pada upaya-upaya memperoleh medali kemenangan sebanyak-banyaknya, semakin banyak medali yang dapat atau diraih, maka semakin menonjol prestasi olahraga di suatu daerah, setiap daerah akan berusaha mengungguli daerah lain dengan menunjukkan jumlah medali simbol kompetisi olahraga memang terkait dengan medali kemenangan, Anggapan tersebut memang demikian adanya, terlebih lagi kalau pembenaran itu mengacu pada kompetisi olahraga multi *event* seperti Pekan Olahraga Nasional yang telah bertahun-tahun dilaksanakan, menurut Kristiyanto Agus (2012: 41) bahwa Pesta olahraga yang memiliki nilai *Nation Character Building* tersebut, kerap kali mengalami simplifikasi nilai sehingga hanya dianggap sebagai ajang persaingan perolehan medali antar daerah se-Indonesia, banyak sedikitnya medali yang didulang menjadi tolak ukur martabat daerah dalam pembangunan olahraga.

Dengan tidak meninggalkan tolak ukur medali kemenangan sebagai cara melihat keberhasilan pembinaan prestasi olahraga, maka indikator keberhasilan pembangunan olahraga yang lebih menyeluruh dan mendasar perlu lebih dikedepankan, Indikator keberhasilan pembangunan olahraga mengacu pada dimensi: (1) partisipasi, (2) ruang terbuka, (3) kebugaran jasmani, dan (4) sumber daya manusia, Keempat dimensi gabungan tersebut mencerminkan keberhasilan

pembangunan olahraga yang kemudian lazim disebut sebagai *Sport Development Index*. *Sport Development index* atau SDI sebenarnya merupakan konsep baru yang menganalog konsep *Human Development Index* atau HDI, Dalam konsep HDI kemajuan pembangunan manusia di suatu negara dapat ditentukan dengan menggunakan indikator tertentu. Jika HDI dapat menentukan tingkat kualitas manusia pada suatu Negara, maka *Sport Development index* digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pembangunan olahraga di suatu daerah, termasuk dapat digunakan untuk melakukan komparasi kemajuan pembangunan olahraga antar daerah Indonesia, dengan demikian penciptaan iklim “persaingan” keberhasilan pembangunan olahraga akan mengarah pada pembangunan hakikat olahraga yang mendasar, bukan persaingan pada sesuatu yang instan dalam wujud prestasi semu dan berdimensi waktu jangka pendek (Kristiyanto Agus, 2012: 42).

Kebutuhan akan instrumen yang standar untuk menilai kemajuan pembangunan olahraga semakin mendesak untuk dipenuhi seiring dengan arah kebijakan pembangunan nasional dari pola sentralistik ke desentralistik, dengan kewenangan baru yang dimiliki, daerah, kota dapat berkompetisi secara sehat dalam rangka memajukan pembangunan olahraga daerah/kota, kini telah dirintis bahkan telah diujicobakan di beberapa provinsi, yakni melalui sebuah pengkajian indeks pembangunan olahraga yang dikenal dengan *Sport Development Index* (SDI). Pengkajian SDI memandang kemajuan pembangunan olahraga di suatu daerah berdasarkan kemajuan dalam empat aspek, Pertama, adalah partisipasi masyarakat, yang menunjukkan indikator keterlibatan aktif masyarakat suatu daerah terhadap aktivitas olahraga. Kedua, adalah ruang terbuka atau ruang publik

yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat diakses untuk kegiatan olahraga masyarakat. Ketiga, adalah sumber daya manusia keolahragaan yang dimiliki dan dapat didayagunakan oleh suatu daerah untuk memajukan olahraga di daerah dan keempat adalah kebugaran jasmani bagai mana tingkat kebugaran jasmani suatu daerah.

Upaya pengkajian untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga perlu dilakukan tiap-tiap daerah atau kota untuk mengetahui secara lebih akurat besarnya nilai indeks pembangunan olahraga, Indeks tersebut merupakan indeks gabungan dari empat dimensi yang meliputi dimensi partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga, ruang terbuka atau ruang publik yang dapat diakses masyarakat untuk kegiatan olahraga, sarana prasarana, dan sumber daya manusia (SDM) keolahragaan. Dengan demikian, suatu daerah/kota dikatakan maju dalam pembangunan olahraganya, bila: pertama, partisipasi masyarakat dalam berolahraga tinggi; kedua, ruang terbuka atau ruang publik yang dimiliki daerah memadai dari sisi jumlah, luas dan variasinya. ketiga, daerah tersebut memiliki Sumber Daya Manusia yang secara kualitas dan kuantitas sangat memadai untuk memajukan olahraga, dan keempat, daerah tersebut memiliki kebugaran jasmani yang baik.

Beranjak dari perihal di atas maka peneliti bermaksud untuk melakukan pengkajian mengenai hasil pembangunan olahraga di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur, melalui studi evaluasi tentang ketersediaan ruang terbuka masyarakat untuk berolahraga, jumlah dan kualitas sumber daya manusia keolahragaan yang mendukung pemerintah dalam memajukan olahraga di

Kabupaten Berau, seberapa tinggi tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Berau dalam berolahraga, dan kebugaran jasmani masyarakat Kabupaten Berau. Sehingga judul dari penelitian ini adalah “Pembangunan Olahraga Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan ditinjau dari *Sport Development Index* (Studi Evaluasi tentang Ruang terbuka, Sumber Daya manusia, Partispasi Masyarakat, dan sarana prasarana)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah yang disusun dan beberapa permasalahan yang ditemukan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Kurang tersedianya ruang terbuka hijau khususnya di areal perkotaan sebagai sarana aktifitas fisik
2. Kurang adanya perhatian dari pemerintah daerah terkait pembagunan olahraga
3. Adanya program dari pemerintah yang tidak berjalan sesuai target pencapaian
4. Belum adanya evaluasi terkait keberhasilan pembagunan olahraga yang ada di Kabupaten Berau

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka masalah penelitian ini secara umum adalah, “Bagaimanakah pembangunan olahraga di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari *Sport Developent Index*”.

Dengan sub-masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimanakah ketersediaan ruang terbuka olahraga bagi masyarakat di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari *Sport Development Index* ?
2. Bagaimanakah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia olahraga di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari *Sport Development Index* ?
3. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari *Sport Development Index* ?
4. Bagaimanakah tingkat kebugaran jasmani masyarakat yang ada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari *Sport Development Index* ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah “Untuk Mengetahui hasil pembangunan olahraga di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur ditinjau dari *Sport Development Index*”, dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka olahraga di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
2. Untuk mengetahui kuantitas dan kualitas sumber daya manusia keolahragaan di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur
3. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

4. Untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani masyarakat yang ada di Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini akan menjadi masukan dan acuan dalam mengevaluasi kebijakan pemerintah kota Berau termasuk kepada Dinas Pemuda dan Olahraga kota Berau serta Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Berau sebagai upaya bersama untuk memajukan, membina, dan mengembangkan olahraga di Kabupaten Berau khususnya, dan Kalimantan Timur pada Umumnya. Juga sebagai informasi kepada para pelaku olahraga untuk dapat berperan dan ikut serta dalam mendukung upaya-upaya pemerintah yang berkaitan dengan pengembangan olahraga di Kabupaten Berau.